

ABSTRAK

Konflik Mali pada tahun 2012 berawal dari aksi protes di wilayah Utara Mali yang kemudian berubah menjadi pemberontakan terhadap pemerintah pusat. Ketidakmampuan pemerintahan Mali menangani pemberontakan di Mali Utara menyebabkan terjadinya kudeta militer di Mali. Presiden sementara Mali kemudian dipimpin oleh militer yaitu Dioncaunda Traore. Sedangkan aksi pemberontakan semakin meluas saat kekosongan konstitusi Mali akibat kudeta dan berindikasi menuju ke arah ibukota Mali, Bamako. Penelitian ini menggunakan teori politik luar negeri di mana orientasi politik luar negeri suatu negara menjadi penuntun bagi pengambilan keputusan kebijakan suatu negara. Kebijakan pemerintah Perancis mengintervensi konflik Mali yang mulai dilaksanakan pada Januari 2013 dilatarbelakangi oleh tiga faktor. Pertama, Perancis ikut terlibat dalam konflik Mali guna mewujudkan kepentingan politik dan keamanannya. Kedua, Perancis bertujuan menjadikan Mali sebagai negara cadangan penghasil uranium. Kekayaan alam yang dimiliki Mali seperti emas hingga uranium telah menjadikan Mali ideal bagi Perancis sebagai negara penghasil uranium. Ketiga, Perancis memenuhi permintaan dari Presiden Mali. Permintaan Presiden Mali kepada Perancis untuk membantu menumpas aksi pemberontak di Mali dikarenakan pemerintah Mali sudah tidak mampu menanganinya. Perancis kembali memulai meningkatkan pengaruhnya di kawasan Afrika, khususnya Afrika Barat yang merupakan wilayah dengan negara-negara bekas jajahannya. Konflik internal Mali yang terjadi sejak tahun 2012 dan masuknya bantuan militer Perancis ke Mali pada tahun 2013 menjadi pintu bagi Perancis untuk memulai menempatkan pengaruhnya lagi. Oleh karena itu, Perancis terlihat bersungguh-sungguh dalam merespon kelompok militan di Mali dengan mengerahkan tiga kekuatan militernya yaitu Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Angkatan Laut.

Kata Kunci : Pemerintah Mali, konflik internal, Perancis, kebijakan luar negeri, uranium.

FRENCH INVOLVEMENT IN MALI INTERNAL CONFLICT IN 2013

ABSTRACT

Mali conflict in 2012 originated from a protest in the northern region of Mali which later turned into a rebellion against the central government. Mali government's inability to deal with the rebellion in northern Mali led to a military coup in Mali. Mali interim president later ruled by the military, Dioncaunda Traore. While the insurgency expanding current vacancy as a result of the coup and the constitution of Mali indicated toward the capital of Mali, Bamako. This study uses the theory of foreign policy in which the foreign policy orientation of a country becomes a guide for decision-making policy of a country. French government policy to intervene in the Mali conflict which commenced in January 2013 was motivated by three factors. First, the French were involved in the Mali conflict in order to achieve political and security interests. Secondly, France aims to make Mali as the alternative country for its uranium. Mali's natural wealth such as gold to uranium have made Mali ideal for France as the country's uranium. Thirdly, the French meet the demand of the President of Mali. Mali request for French President's help crush the rebels in Mali because Mali government is not able to handle it. French back started to increase their influence in Africa, especially West Africa which is the region with countries of the former colonies. Mali internal conflicts have occurred since 2012 and the entry of French military assistance to Mali in 2013 became the door for France to begin putting their influence again. Therefore, the French looked earnestly in response to militant groups in Mali to deploy three military powers, such as the Armed Forces, Air Force, and Navy.

Keywords: Government of Mali, internal conflict, French, foreign policy, uranium.